



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 28 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara...

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Timur.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

7. Badan ...

7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah TIM yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan Dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka Penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat Lainnya sesuai dengan kebutuhan.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
10. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II

MEKANISME DAN PELAKSANAAN PERGESERAN

Pasal 2

- (1) Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar obyek, antar rincian obyek dan/ atau sub rincian obyek.
- (2) Pergeseran anggaran terdiri atas:
 - a. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
 - b. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan Perubahan APBD.

Pasal 3

- (1) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD, sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf a, yaitu pergeseran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, antar kelompok dan antar jenis.
- (2) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf b, yaitu:
 - a. pergeseran ...

- a. pergeseran antar obyek dalam jenis yang sama, Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah;
 - b. pergeseran antar rincian obyek dalam obyek yang sama, Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD;
 - c. pergeseran antar sub rincian obyek dalam rincian obyek yang sama, Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD; dan
 - d. perubahan atau Pergeseran atas uraian dari sub rincian obyek dapat dilakukan atas persetujuan Pengguna Anggaran.
- (3) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD terlebih dahulu. Ketika Perubahan APBD dilakukan, pergeseran anggaran tersebut ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang perubahan Penjabaran APBD.
 - (4) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan setelah perubahan APBD ditampung dalam laporan realisasi anggaran.
 - (5) Semua pergeseran dapat dilaksanakan berdasarkan perubahan DPA-SKPD.
 - (6) Contoh format surat usulan Kepala SKPD terhadap pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud ayat 2 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
 - (7) Contoh format surat Persetujuan terhadap pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud ayat 2 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Pada kondisi tertentu, Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD yang selanjutnya diberitahukan kepada Pimpinan DPRD dan dimuat dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.
- (2) Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD, Pergeseran/ Perubahan anggaran ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. Jika pergeseran tersebut dilakukan setelah perubahan APBD, dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran.
- (3) Pergeseran Anggaran dilakukan dengan Menyusun Perubahan DPA-SKPD.
- (4) Pergeseran ...

- (4) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan Perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme Perubahan.
- (5) Pergeseran Anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran kas.

BAB III
KETENTUAN PELAKSANAAN
Pasal 5

- (1) Pihak terkait SKPD mengusulkan pergeseran anggaran berdasarkan situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan.
- (2) Atas usulan tersebut:
 - a. TAPD mengidentifikasi perubahan Peraturan Daerah tentang APBD yang di perlukan jika pergeseran anggaran merubah Peraturan Daerah tentang APBD;
 - b. Sekretaris Daerah/PPKD/Pengguna Anggaran memberikan persetujuan jika pergeseran anggaran tidak merubah Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran menyiapkan perubahan DPA SKPD sebagai dasar pelaksanaan pergeseran anggaran. Perubahan DPA SKPD di setujui oleh Sekretaris Daerah dan disahkan oleh PPKD.

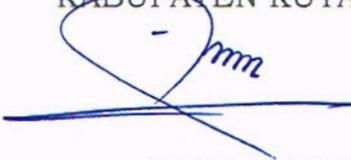
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 21 Oktober 2021
BUPATI KUTAI TIMUR,


ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 22 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a horizontal line and a diagonal stroke.

IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 28

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 28 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PERGESERAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH

A. Contoh Format surat usulan Kepala SKPD terhadap pengeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis yang sama kepada Sekretaris Daerah.

KOP SURAT SKPD

Sangatta, Tanggal /Bulan / Tahun

Nomor	: 900/XXX/XXX/XXX/202x	Kepada	
Sifat	: Penting	Yth.	Sekretaris Daerah
Lampiran	: 1 (satu) Berkas		Kabupaten Kutai
Perihal	: Usulan pengeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis yang sama pada APBD Tahun Anggaran ...		Timur
		Di -	

Sangatta

Dengan memperhatikan ketentuan pengeseran anggaran yang tercantum dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor Tahun tentang Tata Cara Pengeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan ini di ajukan usulan pengeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja yang sama pada APBD T.A, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

1.;
2.;
3. Dst.....

Berdasarkan hal tersebut di atas,kami mohon pertimbangan atas pengeseran anggaran di maksud untuk di setujui, dan dijadikan dasar proses selanjutnya.

Demikian disampaikan atas pertimbangan nya di ucapkan terima kasih

Kepala SKPD
Selaku Pengguna Anggaran,

.....

- B. Contoh Format surat usulan Kepala SKPD terhadap pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dan /atau Pergeseran anggaran antar sub rincian obyek belanja dalam obyek yang sama kepada PPKD.

KOP SURAT
SKPD

Sangatta, Tanggal /Bulan / Tahun

Nomor : 900/XXX/XXX/XXX/202x
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Usulan pergeseran anggaran antar rincian/sub rincian*) obyek belanja dalam obyek belanja yang sama pada APBD Tahun Anggaran.....

Kepada
Yth. Kepala BPKAD
Kabupaten Kutai
Timur Selaku PPKD

Di -

Sangatta

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor Tahun tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan ini di ajukan usulan pergeseran anggaran antar rincian/ sub rincian obyek belanja dalam obyek belanja yang sama pada APBD T.A, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

1.;
2.;
3. Dst.....

Berdasarkan hal tersebut di atas,kami mohon pertimbangan atas pergeseran anggaran di maksud untuk di setujui, dan dijadikan dasar proses selanjutnya.

Demikian disampaikan atas pertimbangan nya di ucapkan terima kasih

Kepala SKPD
Selaku Pengguna Anggaran,

.....

C. Contoh Format surat usulan Kepala SKPD terhadap Perubahan Atau Pergeseran Atas Uraian Dari Sub Rincian Obyek kepada Pengguna Anggaran.

KOP SURAT
SKPD

Sangatta, Tanggal /Bulan / Tahun

Nomor : 900/XXX/XXX/XXX/202x
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Usulan Perubahan atau Pergeseran
Atas Uraian Dari Sub Rincian Obyek
Tahun Anggaran.....

Kepada
Yth. Kepala
Dinas/Badan
Selaku
Pengguna
Anggaran

Di -
Sangatta

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor Tahun tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan ini di ajukan usulan perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian obyek pada APBD T.A, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

1.;
2.;
3. Dst.....

Berdasarkan hal tersebut di atas,kami mohon pertimbangan atas pergeseran anggaran di maksud untuk di setujui, dan dijadikan dasar proses selanjutnya.

Demikian disampaikan atas pertimbangan nya di ucapkan terima kasih

PPTK

Tembusan :

- 1) Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Timur;

.....

DAFTAR RINCIAN
PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBYEK BELANJA DALAM JENIS BELANJA YANG SAMA
DINAS / BADAN
TAHUN ANGGARAN ...

Urusan Pemerintah :
 Bidang Urusan :
 Program :
 Kegiatan :
 Sub Kegiatan :
 Organisasi :
 Sub Unit Organisasi :

SEMULA				MENJADI					
KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN		
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN			VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN
		3	4	5			3	4	5
5	Belanja Daerah	5	Belanja Daerah
5.2	Belanja Modal	5.2	Belanja Modal
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian

Sangatta

Kepala SKPD
 Selaku Pengguna Anggaran

Pangkat
 NIP.

DAFTAR RINCIAN
 PERGESERAN ANGGARAN ANTAR RINCIAN / SUB RINCIAN OBYEK BELANJA DALAM OBYEK BELANJA YANG SAMA
 DINAS / BADAN
 TAHUN ANGGARAN ...

Urusan Pemerintah
 Bidang Urusan
 Program
 Kegiatan
 Sub Kegiatan
 Organisasi
 Sub Unit Organisasi

KODE REKENING	URAIAN	SEMULA			MENJADI			KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN			VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	
5	Belanja Daerah						5	Belanja Daerah					...
5.2	Belanja Modal						5.2	Belanja Modal					...
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin						5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					...
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah						5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah					...
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor						5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					...
5	Belanja Daerah						5	Belanja Daerah					...
5.1	Belanja Operasi						5.1	Belanja Operasi					...
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					...
5.1.02.02	Belanja Jasa						5.1.02.02	Belanja Jasa					...
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					...
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air						5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya					...

Sanggatta
 Kepala SKPD
 Selaku Pengguna Anggaran
 Pangkat
 NIP.

DAFTAR RINCIAN
PERUBAHAN ATAU PERGESERAN ATAS URAIAN DARI SUB RINCIAN OBYEK
DINAS / BADAN
TAHUN ANGGARAN ...

Urusan Pemerintah
 Bidang Urusan
 Program
 Kegiatan
 Sub Kegiatan
 Organisasi
 Sub Unit Organisasi

KODE REKENING	SEMULA					MENJADI					JUMLAH (Rp) 6 = 3X5	
	URAIAN	3	4	5		URAIAN	3	4	5			
1												
5	Belanja Daerah					Belanja Daerah						
5.1	Belanja Operasi					Belanja Operasi						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Belanja Barang dan Jasa						
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Belanja Perjalanan Dinas						
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Belanja Perjalanan Dinas Biasa						
	Transportasi Samarinda					Transportasi Balikpapan						

Sanggatta

PPTK,

.....
 Pangkat
 NIP.

BUPATI KUTAI TIMUR,

 ARDIANSYAH SULAHMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 28 TAHUN 2021
TENTANG STRATEGI PERGESERAN
ANGGARAN

A. Format Keputusan Sekretaris Daerah Tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran

(KOP SEKRETARIAT DAERAH)

KEPUTUSAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR:/...../...../.....

TENTANG

PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN DINAS/BADAN.....

KABUPATEN KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi kegiatan untuk efisiensi belanja pada Dinas/Badan..... Kabupaten Kutai Timur, maka dibutuhkan pergeseran anggaran;
- b. bahwa pergeseran sebagaimana dimaksud dengan huruf a di atas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... Tentang Tata Cara Pergeseran;
3. Surat Permohonan Kepala Dinas/Badan Kabupaten Kutai Timur, usulan pergeseran Nomor Tanggal Tahun ... perihal Usulan Pergeseran Anggaran Tahun;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU Pada Prinsipnya usulan pergeseran Anggaran Dinas/Badan Kabupaten Kutai Timur dapat disetujui dan dapat dilaksanakan sebelum Perubahan APBD Tahun Anggaran sebagaimana terlampir.
- KEDUA SKPD melakukan entri pergeseran dalam Aplikasi SIMDA Keuangan dan SIPD yang selanjutnya disampaikan ke BPKAD Kabupaten Kutai Timur untuk dilakukan posting.
- KETIGA Keputusan pergeseran anggaran DPA SKPD ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DPA SKPD.
- KEEMPAT SKPD melakukan update data pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
- KELIMA Pergeseran Anggaran ini akan diformulasikan dalam DPPA – SKPD Tahun Anggaran
- KEENAM Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Sangatta,.....

Sekretaris Daerah,

B. Format Keputusan PPKD Tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran
(KOP BPKAD)

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR:/...../.....

TENTANG

PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN DINAS/BADAN
.....KABUPATEN KUTAI TIMUR

KABUPATEN KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi kegiatan untuk efisiensi belanja pada Dinas/Badan Kabupaten Kutai Timur, maka dibutuhkan pergeseran anggaran;
b. bahwa pergeseran sebagaimana dimaksud dengan huruf a di atas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Timur;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... Tentang Tata Cara Pergeseran;
3. Surat Permohonan Kepala Dinas/Badan.....Kabupaten Kutai Timur, usulan pergeseran Nomor Tanggal Tahun perihal Usulan Pergeseran Anggaran Tahun;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU Pada Prinsipnya usulan pergeseran Anggaran Dinas/Badan Kabupaten Kutai Timur dapat disetujui dan dapat dilaksanakan sebelum Perubahan APBD Tahun Anggaran sebagaimana terlampir.
- KEDUA SKPD melakukan entri pergeseran dalam Aplikasi SIMDA Keuangan dan SIPD yang selanjutnya disampaikan ke BPKAD Kabupaten Kutai Timur untuk dilakukan posting.
- KETIGA Keputusan pergeseran anggaran DPA SKPD ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DPA SKPD.
- KEEMPAT SKPD melakukan update data pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
- KELIMA Pergeseran Anggaran ini akan diformulasikan dalam DPPA - SKPD Tahun Anggaran
- KEENAM Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Sangatta,.....

PPKD,

C. Format Keputusan SKPD Tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran

(KOP SKPD) PERSETUJUAN

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR:/...../.....

TENTANG

PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN ATAS URAIAN DARI SUB RINCIAN
OBJEK BADAN/DINAS

KABUPATEN KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi kegiatan untuk efisiensi belanja pada Badan/Dinas Kabupaten Kutai Timur, maka dibutuhkan pergeseran atas uraian dari sub rincian objek;
- b. bahwa pergeseran sebagaimana dimaksud dengan huruf a di atas, perlu ditetapkan melalui Persetujuan Pengguna Anggaran pada Badan/Dinas.....Kabupaten Kutai Timur;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... Tentang Tata Cara Pergeseran;
3. Surat Permohonan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Nomor Tanggal Tahun ... perihal Usulan pergeseran atas uraian dari sub rincian objek tahun anggaran;

MEMUTUSKAN:

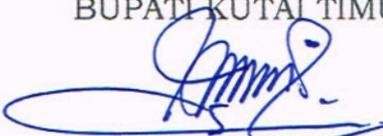
Menetapkan :

- KESATU Pada Prinsipnya usulan pergeseran atas uraian dari sub rincian objek oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dapat disetujui dan dapat dilaksanakan sebelum Perubahan APBD Tahun Anggaran sebagaimana terlampir.
- KEDUA SKPD menyampaikan permohonan ke BPKAD Kabupaten Kutai Timur berkenaan entri pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dalam Aplikasi SIMDA Keuangan dan SIPD yang selanjutnya untuk dilakukan posting.
- KETIGA Persetujuan Pergeseran atas uraian dari sub rincian objek ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DPA SKPD.
- KEEMPAT SKPD melakukan update data pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
- KELIMA Pergeseran atas uraian dari sub rincian objek ini akan diformulasikan dalam DPPA – SKPD Tahun Anggaran
- KEENAM Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Sangatta,.....

Pengguna Anggaran,

BUPATI KUTAI TIMUR,


ARDIANSYAH SULAIMAN